

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Empiris Pada Desa-Desa Di Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende)**

Ansi Geru^{1*}, Astohar²

¹Akuntansi, Sekolah Tinggi Ekonomi Totalwin, Indonesia

E-mail: ansymaka@gmail.com

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin, Indonesia

E-mail: astohardemak@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh kompetensi aparatur desa, kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat, kejelasan sasaran anggaran, dan pemanfaatan teknologi informasi. Metodologi kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, dan 120 responden diberikan teknik pengumpulan data berbasis kuesioner. Kriteria pengambilan sampel berikut digunakan dalam penelitian ini: Kepala desa, sekretaris desa, BPD, perangkat desa (Kaur, Kasi dan lain-lain) serta masyarakat yang berada di kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende. Penelitian ini menggunakan software versi 27.00 untuk menganalisis jawaban responden terhadap pilihan pernyataan serta distribusi frekuensi tanggapan responden. Dari hasil uji parsial penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor kepemimpinan kepala desa dan kompetensi perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tidak dipengaruhi secara signifikan oleh faktor keterlibatan masyarakat, kejelasan sasaran anggaran, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Keywords : Akuntabilitas Dana Desa, kompetensi, kepemimpinan, partisipasi, kejelasan sasaran, teknologi informasi

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berebentuk republik yang menerapkan asas desentralisasi dalam pemerintahan dan memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi daerah. Otonomi daerah sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Indonesia mengutamakan desa dalam pembangunan negara. Desa mempunyai wewenang untuk mengatur pemerintah demi kepentingan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki desa guna mengutamakan pembangunan desa untuk mencapai kesejahteraan. Wewenang yang diberikan tersebut dapat mendorong pemerintah desa untuk bertanggung jawab dalam mengelola dana desa karena dianggap masih rendah dan tidak mampu dalam menyelenggarakan penata usahaan keuangan desa. Ketidakhahaman ketika melakukan pengelolaan keuangan desa dapat mengakibatkan pengelolaan yang buruk sehingga dapat merugikan masyarakat. Penyebabnya ketidakhahaman ketika melakukan pengelolaan keuangan desa adalah minimnya pengetahuan serta keterampilan, tidak mematuhi perencanaan dan prosedur, kurangnya transparansi dan akuntabilitas (Nursin et al., 2022).

Prinsip akuntabilitas diterapkan oleh pemerintah desa dalam tata kelola, yang mencakup akuntabilitas pemerintah supra desa, akuntabilitas kepada badan permusyawaratan desa, dan akuntabilitas sosial kepada masyarakat. Meskipun demikian masih terdapat kendala dalam penerapan akuntabilitas seperti kurangnya transparansi, kualitas sumber daya manusia dan kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi yang dapat menghambat pengelolaan keuangan desa yang efektif (Estrilia et al., 2023). Pemerintah pusat memberikan dana dengan jumlah yang sangat besar setiap tahun, namun permasalahan pembangunan sering terjadi di setiap desa. Banyak masyarakat beranggapan bahwa pemerintah telah menyalahgunakan dana karena banyak proyek pembangunan yang belum selesai. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa menyebabkan masyarakat menganggap bahwa dana desa yang diolah tidak diterapkan transparan.

Adanya ketidak transparan dana desa yang dikelola tersebut terjadi disalah satu desa di Provinsi NTT kabupaten Ende kecamatan Maukaro tepatnya di desa Kobaleba yang diduga bermasalah dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan rabat yang dimulai sejak tahun 2017 sampai 2021 belum selesai meskipun telah menghabiskan dana ratusan juta rupiah (Montero, 2021). Permasalahan tersebut lolos dari audit yang diperiksa oleh BPKP kabupaten Ende. Masyarakat setempat mengungkapkan banyak anggaranh desa yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi pembangunan yang ada. Selain proyek jalan rabat pembangunan air minum juga belum terselesaikan meski dananya mencapai ratusan juta. Masyarakat menilai bahwa transparansi pengelolaan dana desa kobaleba sangat rendah. Masyarakat juga mengatakan pengelolaan dana desa lebih banyak diatur oleh kepala desa dan staf tanpa melibatkan masyarakat.

Efektivitas pejabat desa, kepemimpinan kepala desa, keterlibatan masyarakat, kejelasan tujuan anggaran, serta teknologi informasi merupakan beberapa elemen yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana daerah. Penelitian sebelumnya menyarankan kepada penelitian selanjutnya untuk menambah variabel yang belum ada dalam penelitian tersebut agar dapat mempertimbangkan untuk memperluas objek sehingga hasil penelitian lebih dapat digenerealisasi (Febrianti et al., 2024). Pada penelitian ini melakukan penambahan variabel yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Jika teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan produktivitas, pengelolaan dana desa akan menjadi lebih sederhana. Teknologi informasi selain dapat memproses dan menyimpan informasi, juga dapat mengirim dan mendistribusikan informasi (Deviyanti & Wati, 2022b).

Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang mempunyai karakteristik tertentu guna mewujudkan kinerja optimal di bidangnya. Karyawan dengan pemahaman yang kurang memadai cenderung kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan yang dapat menyebabkan tidak efisiennya waktu, biaya dan tenaga. Dunnetts mengartikan skil sebagai suatu kompetensi seseorang dalam melakukan aktivitas. Skil didapatkan dari pelatihan, pengalaman ataupun kebiasaan (Pratiwi & Dewi, 2021).

Kepemimpinan kepala desa mencakupi aspek seperti pengetahuan, keterampilan manajerial dan sikap. Kepala desa yang efektif mampu merencanakan, melaksanakan dan menyebarkan program pembangunan serta berkomunikasi dengan baik terhadap masyarakat. Menurut (Ratmono et al., 2023) bahwa kepemimpinan kepala desa berpengaruh baik terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari et al., 2022) juga mengatakan hal yang sama bahwa kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas manajemen.

Keterlibatan masyarakat merupakan faktor dalam keberhasilan dalam program pembangunan dan pengembangan masyarakat. Identifikasi masalah dan peluang terkini merupakan aspek lain dari partisipasi masyarakat yang melampaui proses pengambilan

keputusan. Adanya pemahaman yang mendalam terhadap kondisi dan tantangan yang dihadapi, masyarakat dapat membantu pemerintah agar dapat lebih mudah mengidentifikasi masalah yang perlu diatasi. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan memastikan bahwa program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka (Pahlawan et al., 2020).

Pengelolaan dana desa yang terus bertambah dari tahun ke tahun sangat bergantung pada kejelasan sasaran anggaran. Tingkat kejelasan sasaran anggaran itu sendiri tercermin dari kejelasan sasaran. Keberhasilan pengelolaan dana desa akan dipengaruhi oleh pengelola yang bekerja secara efektif sesuai dengan sasaran yang ditetapkan jika sasaran anggaran ditetapkan (Dewi & Erlinawati, 2020).

Menurut penelitian Pebriyanto & Sumadi (2021), pengelolaan dana desa dipengaruhi secara negatif oleh kejelasan sasaran anggaran, tetapi secara positif oleh kompetensi aparatur daerah. Di sisi lain, Dwipayani & Hutnaleontina,(2022) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi secara positif oleh kejelasan sasaran anggaran. Menurut Hilda Agustin et al., (2023), penggunaan teknologi informasi, kejelasan sasaran anggaran, dan kecakapan aparatur desa semuanya meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian Pebriyanto & Sumadi, (2021) menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran berdampak negatif terhadap pengelolaan dana desa, sementara kompetensi aparatur desa berpengaruh positif. Sebaliknya, Dwipayani & Hutnaleontina,(2022) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran justru berkontribusi positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hilda Agustin et al., (2023) mengungkapkan bahwa kompetensi aparatur desa, kejelasan sasaran anggaran, dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Meskipun demikian, Romadhon & Nawawi,(2024) menemukan bahwa faktor ini tidak dipengaruhi oleh kompetensi perangkat desa. Menurut Pahlawan et al.,(2020), penggunaan teknologi tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap akuntabilitas, tetapi keterlibatan masyarakat dan kompetensi perangkat desa secara signifikan meningkatkannya. Selain itu, Marlina et al.,(2021) menekankan peran kepemimpinan kepala desa yang memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas. Namun, Febrianti et al.,(2024) menemukan bahwa hanya kompetensi perangkat desa yang memiliki pengaruh positif, sedangkan partisipasi masyarakat, pemahaman target anggaran, dan kepemimpinan kepala desa tidak memiliki pengaruh.

Alasan penelitian ini mengambil objek penelitian di kecamatan maukaro karena ada beberapa desa di kecamatan maukaro terdapat permasalahan tentang dana desa. Desa-desa yang terdapat permasalahan yaitu desa kobaleba, desa kebirangga dan desa Kolikapa. Berdasarkan informasi dari masyarakat setempat anggaran desa sering kali tidak sejalan dengan realisasi pembangunan yang ada, dimana banyak proyek pembanguana yang belum terlaksanakan. Masyarakat menilai bahwa sistem birokrasi di desa kurang transparan sehingga banyak keputusan diambil secara sepihak tanpa adanya musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tingkat keterbukaan dalam mengelola dana desa dinilai sangat buruk oleh masyarakat, dan pengelolaan dana desa lebih banyak diatur oleh kepala desa dan aparatur desa tanpa melibatkan partisipasi masyarakat.

2. LANDASAN TEORI

Landasan Teori

Teori Stewardship

Menurut Donaldson dan Davis (1989) dalam Anggraeni et al., (2023), teori stewardship menjelaskan keadaan dimana seorang manajer lebih mendahulukan di atas kepentingannya sendiri untuk mencapai tujuan utamanya. Menurut Teori tersebut mengataka bahwa keberhasilan

dan kepuasan terdapat hubungan yang kuat. Teori stewardship ditujukan untuk kepentingan bersama. Ketika keinginan steward tidak sama dengan prinsipal maka steward lebih memilih bekerjasama ketimbang menantang, karena steward meyakini bahwa kepentingan bersama merupakan usaha untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Teori ini memandang pemerintah desa sebagai (steward) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (prinsipal). Steward pada penelitian ini berkedudukan selaku organisasi yang memiliki wewenang dalam melakukan pengelolaan dana desa dengan mewujudkan tugas dan fungsi secara baik untuk memenuhi kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat.

Pada penelitian ini, organisasi yang bertugas mengawasi keuangan desa adalah pemerintah desa. Menurut Teori Stewardship yang sesuai dalam penelitian ini, pemerintahan desa diberikan kewenangan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena seluruh anggota pemerintah desa baik pemimpin desa maupun staf yang mendampinginya memiliki tujuan yang sejalan, yaitu memajukan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Teori stewardship berimplikasi bagi pemerintah desa sebagai entitas terpercaya untuk memenuhi laporan akuntabilitas dan mengakomodasi ambisi masyarakat dengan menawarkan layanan berkualitas (Nurhalimah et al., 2023).

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas merupakan tugas melaporkan proses penganggaran sejak mulai sampai selesai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, serta mempertanggungjawabkan pencapaian dan kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi. Lembaga harus menjelaskan kinerjanya kepada publik sebagai bagian dari akuntabilitas, memastikan bahwa laporannya jujur dan transparan. Prinsip dasar akuntabilitas adalah berorientasi pada prestasi, kepatuhan terhadap aturan, dan komitmen kepemimpinan (Audia & Mulyani, 2022). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, terdapat lima tahapan pengelolaan dana desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban untuk menjamin akuntabilitas penggunaan uang desa, setiap tahapan dilakukan secara terencana dan terbuka. Masyarakat harus diberi informasi secara jelas dan ringkas mengenai tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah desa (Laili & Suhaedi, 2023).

Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi merupakan keterampilan yang ditunjukkan dalam pekerjaan. Menurut Juniarti et al., (2022) kemampuan yang dimaksud antara lain kemampuan berprestasi, pelayanan, kepemimpinan, manajemen, termasuk pengendalian diri dan dedikasi terhadap pekerjaan. Kompetensi yang dimiliki aparatur desa antara lain memiliki pengetahuan dari hasil pembelajaran formal, yang pernah dipelajari seperti memiliki keahlian dan kemampuan dalam mengelola tugas dengan baik melalui sikap yang sopan dan ramah dalam bekerja (Polutu et al., 2022). Pengelolaan dana desa diketahui berdampak positif terhadap pengelolaan uang desa, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan et al., (2020), Sarah et al., (2020), Situngkir & Simarmata, (2022), Melasari et al., (2024) yang menunjukkan semakin tinggi kompetensi aparat desa dalam mencapai akuntabilitas, maka pilihan terbaik akan diambil untuk memberikan pelayanan yang sebesar-besarnya berdasarkan tanggung jawab yang diberikan saat mengambil keputusan mengenai penggunaan dana desa karena dianggap dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam mengelola keuangan desa sesuai amanah yang diberikan.

H1 :Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Kepemimpinan Kepala Desa

Salah satu keterampilan yang dimiliki pemimpin desa adalah kepemimpinan. Kepala Desa mampu mempengaruhi desa dan bawahannya. Hal ini mencakup kemampuan berkomunikasi secara efektif, memperhatikan tujuan masyarakat, dan mengungkapkan visi dan misi desa dengan jelas. Sebagai pemimpin yang baik harus memiliki wibawa yang dihormati oleh bawahannya dan tegas dalam pengambilan keputusan. Untuk memaksimalkan pemanfaatan uang desa bagi kepentingan masyarakat, kepala desa dapat menetapkan sasaran anggaran yang tepat dan jelas (Krisnanti et al., 2022).

Gaya kepemimpinan yang baik seperti komunikasi efektif dan pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat bisa meningkatkan efektivitas kerja perangkat desa. Keberhasilan program pembangunan juga dipengaruhi oleh adanya hubungan kerja yang positif antara kepala desa dan masyarakat (Wulandari et al., 2022). Kepemimpinan kepala desa turut membantu agar pengelolaan dana desa lebih akuntabel, menurut penelitian terdahulu oleh Ratmono et al., (2023). Menurut penelitian Wulandari et al.,(2022), kepemimpinan kepala desa berdampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang sesuai dengan kesimpulan tersebut.

Hubungan kerjasama yang baik antara kepala desa dan masyarakat juga berkontribusi terhadap keberhasilan program pembangunan (Wulandari et al., 2022). Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Ratmono et al., (2023) kepemimpinan kepala desa berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari et al.,(2022) juga menunjukkan adanya pengaruh positif kepemimpinan kepala desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H2 : Kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam menentukan keputusan dan pengawasan selama proses pembangunan. Melalui keterlibatan ini, masyarakat menjadi subjek pembangunan berkelanjutan dan penerima manfaat. Partisipasi memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi dan kebutuhan mereka, meningkatkan kepercayaan terhadap program, serta berpartisipasi dalam pengusulan anggaran dan evaluasi penggunaan dana desa (Giriani et al., 2021).

Keikutsertaan masyarakat dapat mengusulkan ide-ide sesuai harapan mereka yang dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa. Melalui evaluasi dan umpan balik dari masyarakat proses pengelolaan program pembangunan dapat berjalan lebih transparan dan efektif sehingga mendorong kesejahteraan desa secara keseluruhan (Ratmono et al., 2023). Peran aktif dan efisien dari masyarakat memiliki peran penting untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan pendanaan desa (Deviyanti & Wati, 2022). Akuntabilitas pengelolaan anggaran desa dipengaruhi secara positif oleh keterlibatan masyarakat, menurut penelitian sebelumnya oleh (Irma, 2022). Hasil ini konsisten dengan penelitian oleh (Sulaiman Ahmad, 2023).

H3 :Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kejelasan sasaran Anggaran

Tingkat diartikulasikannya tujuan secara tepat, jelas, dan dengan cara yang dapat dipahami oleh pihak yang memberikan bantuan tercermin dalam kejelasan proses perencanaan anggaran. Lebih jauh, tujuan keuangan dibuat sesuai dengan tujuan organisasi yang perlu dipenuhi (Anggreni et al., 2021). Bagaimana suatu perangkat membuat anggaran yang sejalan dengan tujuan lembaga pemerintah harus dicapai tergantung pada seberapa jelas target anggaran

tersebut. Jika tujuan keuangan tidak dirumuskan dengan jelas, hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan diantara pelaksanaan anggaran dalam menjalankan tugasnya.

Akibatnya tidak termotivasi untuk mencapai hasil yang diharapkan. Menurut penelitian sebelumnya oleh Krisnanti et al., (2022), Estrilia et al., (2023), Agustin et al., (2023), kejelasan target anggaran merupakan ukuran seberapa baik target dikomunikasikan dan dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab (Estrilia et al., 2023).

H4 : Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi mencakup berbagai komponen teknologi seperti komputer dan perangkat lain, yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak serta jaringan basis data dan komponen teknologi lainnya. Komponen tersebut dipakai dalam mengelolah suatu data yang akurat dan relevan agar mendapatkan informasi yang berkualitas. Aktivitas seseorang dalam bekerja sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi. Dalam bekerja teknologi informasi mempunyai peran penting terhadap aktivitas seseorang dalam bekerja. Peran penting yang dimaksud adalah dalam bekerja seseorang sering menggunakan komputer dan alat teknologi lainnya untuk membantu memudahkan pekerjaan agar lebih cepat terselesaikan (Laili & Suhaedi, 2023).

Penggunaan teknologi informasi diartikan sebagai proses pengolahan dan berbagi data melalui penggunaan komputer dan peralatan telekomunikasi untuk aktivitas seseorang (Anggreni et al., 2021). Informasi yang lebih berkualitas akan dihasilkan jika teknologi informasi diterapkan secara lebih efektif dan tepat. Pengelolaan dana desa semakin efektif dengan teknologi informasi, terutama teknologi informasi yang moderen dan canggih. Penggunaan teknologi ini berperan dalam meningkatkan efisiensi serta mengurangi kecurangan. Selain itu, pengelolaan alokasi dana desa dilakukan melalui pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi informasi yang canggih dan modern, sehingga akan mengefektifkan pengelolaan dan menurunkan kecurangan dalam pengelolaannya (Kartawinagara & Rahayu, 2023). Menurut penelitian Juniarti et al., (2022), Kuncahyo & Dharmakarja, (2022), Jauhari & Sulistyowati, (2024), penerapan teknologi informasi dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan desa. Data tersebut semakin menguatkan klaim tersebut. Berdasarkan temuan penelitian mereka, variabel pemanfaatan informasi berpengaruh positif terhadap pengelolaan pendapatan desa.

H5: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan kuantitatif. Sumber data utama penelitian ini adalah sumber informasi utamanya. Survei digunakan untuk mengumpulkan data, dengan kuesioner sebagai instrumen utamanya. Survei disebarkan kepada peserta melalui Google Form, dan setiap respons diberi skor atau nilai. Penelitian ini menggunakan skala Likert, yang memiliki rentang pengukuran 1 hingga 5, untuk mengevaluasi kuesioner.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah 120 orang warga Kecamatan Maukaro dan seluruh perangkat desa yang bekerja di 15 kantor pemerintahan desa. Sampel penelitian dipilih dengan metode *Purposive Sampling* berdasarkan kriteria sebagai berikut: Kepala Desa,

Sekretaris Desa, Kepala Bidang Perencanaan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat.

Definisi Operasional variabel

Metrik berikut digunakan untuk mengukur variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa: 1. penyusunan rencana keuangan, 2. Pelaksanaan serta pembiayaan kegiatan, 3. Evaluasi terhadap kinerja, 4. penyusunan laporan keuangan, 5. Transparansi dan kejujuran dalam penyampaian informasi, 6. Kecukupan organisasi (Estrilia et al., 2023) dan (Audia & Mulyani 2022). Variabel kompetensi apratur desa diukur menggunakan indikator antara lain: 1. Tingkat pengetahuan, 2. Keahlian dan keterampilan, 3. Etos kerja serta sikap, 4. Pengalaman pelatihan, 5. Inisiatif dalam menjalankan tugas (Polutu et al., 2022) dan (Pebriyanto & Sumadi, 2021). Variabel kepemimpinan kepala desa diukur menggunakan indikator sebagai berikut : 1. Persepsi terhadap pemimpin, 2. Nilai-nilai kepemimpinan, 3. Sikap yang ditunjukkan oleh pemimpin, 4. Perilaku yang ditampilkan dalam kepemimpinan (Setyowati et al., 2020). Variabel partisipasi masyarakat diukur berdasarkan indikator sebagai berikut: 1. penyampaian informasi, 2. Konsultasi, 3. Kemitraan, 4. Pendelegasian tugas, 5. Keterlibatan aktif warga 6. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan (Dwipayani & Hutnaleontina, 2022) Variabel kejelasan sasaran anggaran menggunakan indikator sebagai alat ukur seperti: 1. Tujuan yang ingin dicapai, 2. Kinerja yang diharapkan, 3. Standar yang diterapkan, 4. Jangka waktu pelaksanaan, 5. Prioritas Sasaran, 6. Tingkat kesulitan dalam mencapai target, 7. Koordinasi dalam implementasi (Estrilia et al., 2023). Variabel teknologi informasi menggunakan indikator sebagai alat analisis seperti: 1. Penggunaan perangkat lunak aplikasi, 2. Pengelolaan serta penyimpanan data keuangan, 3. Pemanfaatan jaringan internet dalam pengolahan informasi 4. Sistem manajemen yang digunakan, 5. Pemeliharaan perangkat komputer (Nursin et al., 2022).

Metode Analisis Data

Dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 27 versi terbaru dari vendor, penelitian ini menggunakan strategi analitik deskriptif. Analisis ini dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dimana perangkat lunak statistik digunakan untuk mengevaluasi tanggapan responden terhadap pernyataan yang diberikan serta menganalisis distribusi frekuensi dari jawaban responden.

Uji Normalitas, Multikolinearitas, Heteroskedastisitas

Untuk memastikan apakah data yang digunakan memiliki distribusi normal, digunakan uji normalitas. Korelasi antara variabel independen dalam model regresi dinilai menggunakan uji multikolinearitas. Untuk memastikan model regresi tidak memiliki masalah heteroskedastisitas, dilakukan uji heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Uji regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini untuk menguji bagaimana faktor-faktor independen memengaruhi variabel dependen. Berikut ini adalah cara model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dibangun:

Akuntabilitas = $\alpha + \beta^1$ Kompetensi aparatur + β^2 kepemimpinan + β^3 partisipasi masyarakat + β^4 kejelasan sasaran + β^5 pemanfaatan teknologi + e

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Tingkat di mana variabel bebas dapat menjelaskan variasi dalam variabel terikat diukur dengan koefisien determinasi (R^2), yang nilainya berkisar antara 0 dan 1. Semakin dekat nilai

R^2 ke angka 1, semakin besar variabilitas variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Sebaliknya nilai R^2 yang rendah mengindikasikan bahwa variabel bebas kurang efektif dalam memprediksi perubahan variabel terikat. Adjusted R^2 negatif mungkin terjadi jika nilai R^2 secara konsisten positif. Rumus $(1-k)/(n-k)$ dapat digunakan untuk memperoleh R^2 yang Disesuaikan, yang secara teknis bernilai nol ketika $R^2 = 1$ dan dianggap negatif dalam pengujian empiris. $K > 1$ akan menghasilkan R^2 yang disesuaikan positif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria penelitian ini mencakup peserta yang berusia antara 18 dan 45 tahun dan telah menyelesaikan sekolah menengah atas atau yang sederajat, S2. Jumlah responden dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 120 orang karena metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sampel jenuh. Setiap dusun di Kecamatan Maukaro mendapatkan kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data. Namun dari total 120 kuesioner yang telah dibagikan, hanya 114 yang dikembalikan kepada peneliti karena data yang diperoleh tidak memenuhi kriteria normalitas.

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil uji validitas dari indikator kompetensi aparatur desa (X1) sebesar 0,748 ; 0,818; 0,699; 0,805; 0,787; Variabel kepemimpinan kepala desa (X2) sebesar 0,785; 0,778; 0,831; 0,850. Variabel partisipasi masyarakat (X3) sebesar 0,721; 0,764; 0,833; 0,745; 0,663; 0,798. Variabel kejelasan sasaran anggaran (X4) sebesar 0,730; 0,740; 0,791; 0,822; 0,704; 0,726; 0,733. Variabel pemanfaatan teknologi informasi (X5) sebesar 0,806; 0,832; 0,742; 0,819; 0,747. Variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) sebesar 0,667; 0,759; 0,763; 0,712; 0,745; 0,74. Hasil tersebut menunjukkan bahwa indikator dari semua variabel tersebut dinilai valid sebab r hitung dari hasil tersebut lebih besar dari rtabel (0,187). Hasil dari uji realibilitas dari semua variabel sebesar 0,836; 0,826; 0,850; 0,869; 0,849; 0,833. Dari hasil tersebut menyatakan semua variabel nyatakan reielabel karena hasil uji dari uji reliabilitas tersebut lebih tinggi dari niali cronbach alpa sebesar 0,70.

Hasil Uji Normalitas dan Uji *Goodnesss of fit*

Setelah melakukan penyaringan data dari 120 kuesioner, sebanyak 6 kuesioner dikeluarkan sehingga tersisa 114 kuesioner. Data yang digunakan menunjukkan distribusi normal, sebagaimana dibuktikan melalui uji Kolmogorov-Smirnov. Mengingat nilai signifikansi analisis tersebut adalah 0,250—lebih besar dari 5%—data tersebut dapat dianggap terdistribusi secara teratur. Hal ini juga diperkuat oleh uji normalitas menggunakan SPSS versi 27, yang menunjukkan pola yang searah dan mengikuti garis diagonal baik pada grafik histogram maupun grafik normal probability plot. Nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05, juga dihasilkan berdasarkan temuan uji F pada tabel keluaran. Hal ini menunjukkan bagaimana faktor kepemimpinan kepala desa, kecakapan aparatur daerah, penggunaan teknologi informasi, dan keterlibatan masyarakat secara bersamaan berdampak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Persamaan Regresi Berganda

Tabel 1
Hasil Uji Linear Bergand

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.883	1.356		3.601	<.001		
	Kompetensi aparatur desa	.556	.099	.520	5.624	<.001	.325	3.076
	Kepemimpinan kepala desa	.317	.122	.236	2.589	.011	.333	3.006
	Partisipasi masyarakat	.098	.089	.113	1.100	.274	.263	3.798
	Kejelasan sasaran anggaran	.134	.080	.160	1.682	.095	.308	3.252
	Pemanfaatan teknologi informasi	-.141	.102	-.130	-1.379	.171	.314	3.180

a. Dependent Variable: Akuntabilitas pengelolaan dana desa

Berdasarkan hasil uji pada tabel diatas maka dibuat persamaan linear sebagai berikut :

$$Y = 4,883 + 0,556X_1 + 0,317X_2 + 0,098X_3 + 0,134X_4 - 0,141X_5 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai konstanta sebesar 4,883 memiliki arti akuntabilitas pengelolaan dana desa berada pada angka 4,883% apabila seluruh variabel bebas yang meliputi peran serta masyarakat, kejelasan sasaran anggaran, kepemimpinan kepala desa, kompetensi perangkat desa, dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai sebesar 0%.

Peningkatan kompetensi aparatur desa berhubungan dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa, berdasarkan koefisien regresi kompetensi aparatur desa sebesar 0,556. Hipotesis pertama (H1) diterima karena nilai signifikansi yang dicapai sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 sehingga temuan ini bermakna signifikan.

Kepemimpinan pengelolaan dana desa meningkat seiring dengan kualitas kepemimpinan kepala desa, berdasarkan koefisien regresi sebesar 0,317. Hipotesis kedua (H2) diterima karena hasil ini juga signifikan, dengan nilai signifikansi sebesar 0,011 yang lebih kecil dari 0,05.

Koefisien regresi sebesar 0,098 untuk keterlibatan masyarakat, di sisi lain, menunjukkan bahwa tanggung jawab pengelolaan anggaran desa tidak meningkat seiring dengan penurunan keterlibatan masyarakat. Namun, karena nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,274 lebih tinggi dari 0,05, hipotesis ketiga (H3) ditolak, yang menunjukkan bahwa hasil ini tidak signifikan.

Koefisien regresi kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,134, artinya tanggung jawab pengelolaan dana desa tidak meningkat jika tidak ada kejelasan sasaran anggaran. Karena nilai signifikansi yang dihitung sebesar 0,095 lebih besar dari 0,05, maka hipotesis keempat (H4) ditolak, sehingga hasil ini tidak konsisten.

Berdasarkan koefisien regresi pemanfaatan teknologi informasi sebesar -0,141, tanggung jawab pengelolaan dana desa tidak akan meningkat jika pemanfaatan teknologi tidak maju. Hipotesis kelima (H5) ditolak karena hasilnya juga tidak signifikan, dengan nilai signifikansi sebesar 0,171 yang lebih besar dari 0,05.

Pembahasan

Kecakapan aparatur desa terbukti memberikan dampak positif yang besar, menunjukkan bahwa aparatur desa telah melaksanakan tugas dan kewajibannya di Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, secara efektif dan sesuai dengan bidang tugasnya. Semakin tinggi kemampuan aparatur desa dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya, maka semakin baik pula kualitas penyusunan laporan keuangan desa. Temuan ini selaras dengan hasil studi terdahulu oleh (Ratna Laia et al., 2022), (Ahmad & Sapar, 2023), (Anggraeni et al., 2023). Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa akan lebih baik seiring dengan

bertambahnya pengetahuan dan kemampuan para pejabat. Selain itu, etos kerja yang baik serta sikap profesional dari aparatur desa berkontribusi dalam meningkatkan kejujuran dan transparansi informasi dalam pengelolaan dana desa. Inisiatif dalam bekerja juga berperan penting dalam memudahkan pencapaian tujuan pengelolaan dana desa. Dengan keahlian yang dimiliki, laporan keuangan dapat disiapkan secara lebih efektif dan sesuai dengan peraturan terkait oleh otoritas desa.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa terbukti berdampak positif dan signifikan terhadap kepemimpinan kepala desa. Oleh karena itu, tingkat tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa berkorelasi positif dengan kepemimpinan kepala desa di Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende. Kepemimpinan kepala desa mencerminkan sejauh mana kemampuan seorang pemimpin dalam memengaruhi proses pertanggungjawaban dana desa. Gaya kepemimpinan yang efektif, seperti kemampuan berkomunikasi dengan baik serta pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan masyarakat, dapat meningkatkan kinerja aparatur desa secara positif. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Krisnanti et al., 2022), (Setyowati et al., 2020), (Wulandari et al., 2022), kepemimpinan kepala desa sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kesimpulan ini sesuai dengan temuan tersebut karena perilaku kepala desa yang bertanggung jawab dalam mengelola dana desa serta memastikan transparansi dalam pelaksanaannya. Sebagai seorang pemimpin, kepala desa harus memiliki keterampilan yang mampu memengaruhi serta membimbing bawahannya agar bekerja dengan penuh tanggung jawab. Efisiensi pengelolaan keuangan desa akan meningkat apabila ada kepemimpinan, pengaruh, dan motivasi yang kuat dari pemerintah desa, sehingga akuntabilitasnya semakin meningkat.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa tidak banyak dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pengelolaan dana. Jika masyarakat turut serta dalam pengelolaan, aparat desa akan lebih mudah menjalankan pembangunan dengan lebih optimal. Namun, jika masyarakat tidak berpartisipasi, maka kemungkinan besar pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akan menggelapkan keuangan desa semakin besar. Melibatkan masyarakat merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwipayani & Hutnaleontina, (2022), Wulandari et al., (2022) Febrianti et al., (2024) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak terlalu dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya transparansi aparat desa dalam menyampaikan laporan keuangan, sehingga masyarakat tidak memiliki akses untuk turut mengawasi pengelolaan dana tersebut. Padahal, keterlibatan masyarakat dapat membantu mengurangi risiko kecurangan maupun kesalahan yang dilakukan oleh perangkat desa.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa tampaknya tidak terpengaruh oleh kejelasan tujuan anggaran. Hal ini disebabkan karena tujuan yang diproyeksikan tidak dapat terpenuhi karena pemerintah desa tidak mampu membuat target anggaran yang tepat. Menurut penelitian sebelumnya oleh (Pebriyanto & Sumadi, 2021), Audia & Mulyani, (2022), (Febrianti et al., 2024), akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa tidak terpengaruh oleh kejelasan tujuan anggaran. Penelitian ini mendukung temuan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan sasaran anggaran tidak serta-merta membantu pemerintah desa dalam mengalokasikan anggaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika sasaran anggaran tidak disusun dengan jelas, dapat timbul kebingungan serta ketidakpuasan di antara pelaksana anggaran dalam menjalankan tugasnya. kejelasan sasaran anggaran tidak secara langsung meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa.

Bukti menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam administrasi tidak

banyak berpengaruh terhadap akuntabilitas anggaran desa. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam menggunakan teknologi tersebut. Meskipun perkembangan teknologi semakin pesat, tanpa keterampilan yang memadai, hasil yang diharapkan tidak akan tercapai. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan aparat desa menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Padahal, pengelolaan keuangan desa yang efisien sangat bergantung pada pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, untuk membantu pemerintah desa lebih memahami cara pemanfaatan teknologi informasi, diperlukan pelatihan khusus. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Merawati et al., 2022), (Kuncahyo & Dharmakarja, 2022), yang menemukan bahwa adopsi teknologi informasi tidak terlalu berpengaruh terhadap akuntabilitas dana daerah. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman serta kurangnya fasilitas seperti komputer dan perangkat lunak turut menjadi kendala dalam penerapan teknologi di pemerintahan desa.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Berdasarkan tabel di atas, nilai *adjusted R square* sebesar 0,700 atau 70,0% yang menunjukkan bahwa variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, peran serta masyarakat, kejelasan sasaran anggaran, dan informasi teknologi. Sedangkan sisanya sebesar 30,0% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. *Adjusted R square* digunakan untuk menunjukkan nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini karena melibatkan lebih dari dua variabel.

5. KESIMPULAN

Apakah kompetensi aparatur daerah, kepemimpinan kepala desa, keterlibatan masyarakat, kejelasan sasaran anggaran, dan penggunaan teknologi informasi mempengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan tujuan dari penelitian ini. Kepemimpinan kepala desa dan kompetensi aparatur desa memiliki dampak positif dan substansial terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, menurut hasil uji hipotesis. Namun, penggunaan teknologi informasi, kejelasan sasaran anggaran, dan keterlibatan masyarakat tidak menunjukkan dampak yang besar. Variabel-variabel ini tidak efektif karena masyarakat tidak terlibat secara aktif dalam pengelolaan dana daerah. Selain itu, pemerintah desa belum menyusun perencanaan anggaran secara terperinci sehingga sasaran anggaran belum tercapai secara optimal. Keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi kendala, di mana aparatur desa masih kurang memahami serta memiliki keterampilan dalam penggunaannya, ditambah dengan minimnya fasilitas pendukung seperti komputer dan perangkat lunak yang memadai. Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut penelitian ini mempunyai keterbatasan dan kekurangan untuk ditinjau peneliti selanjutnya seperti keterbatasan dalam memilih objek dan variabel penelitian. Adapun saran untuk peneliti berikutnya sebaiknya memilih objek yang lebih luas seperti di daerah kabupaten atau provinsi. Peneliti berikutnya juga disarankan untuk menambah variabel seperti variabel intervening atau moderating untuk menganalisis keterbatasan dalam mengelola dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, G. A. P. W., Putra, C. G. B., & Muliati, N. K. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Di Kecamatan

- Kerambitan Kabupaten Tabanan). *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi Oktober 2023*, e-ISSN 2798-8961, 140–149.
- Anggreni, N. P. D., Sumadi, N. K., & Andayani W, R. D. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Audit Kinerja Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Kantor Desa Se-Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan). *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 386–405.
- Deviyanti, N. K., & Wati, N. W. A. E. (2022a). Pengaruh Kompetensi, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 36–48. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i2.2547>
- Deviyanti, N. K., & Wati, N. W. A. E. (2022b). Pengaruh Kompetensi, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Mengwi, Kab Badung). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(21), 36–48. <https://balipost.com>
- Dewi, N. W. K. P., & Erlinawati, N. W. A. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kantor Desa Se- Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 273–298. <https://doi.org/10.32795/hak.v1i1.778>
- Dwipayani, N. K. S., & Hutnaleontina, P. N. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Masyarakat Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kantor Desa Se-Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 28–47. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i1.2281>
- Estrilia, D., Wijayanti, I., & Hidayah, N. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Sistem Akuntansi dan Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 20(1), 01–11. <https://doi.org/10.36406/jam.v20i01.681>
- Febrianti, R., Amalia, D., & Dahlan, A. (2024). *Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa , Kepemimpinan Kepala Desa , Partisipasi Masyarakat , dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. 2, 256–263.
- Giriani, M., Dahtiah, N., & Burhany, D. I. (2021). Pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Batujajar. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 480–492.
- Hilda Agustin, H. A., Anggraeni Yunita, & Wenni Anggita. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan BPD Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Banyu Asin Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(3), 867–876. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1191>
- Indah Pratiwi, P., & Sari Dewi, R. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Namorambe

- Kabupaten Deli Serdang. *Indonesian Journal of Business Analytics* , 1(2), 183–198.
- IRMA, I. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasita*’, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v13i1.341>
- Jauhari, R. M., & Sulistyowati, E. (2024). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar). *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 3(7).
- Juniarti, U., Adha Inapty, B., & Rakhmawati, I. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Labuhan Haji Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 608–620. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i3.298>
- Kartawinagara, D. F., & Rahayu, S. (2023). ... Dana Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa *EProceedings* ..., 10(2), 1226–1238. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/download/19896/19262>
- Krisnanti, N. N. P., Padnyawati, K. D., & Hutnaleontina, P. N. (2022). Pengaruh Kepemimpinan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 124–130. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i1.2288>
- Kuncahyo, H. D., & Dharmakarja, I. G. M. A. (2022). Pengaruh Kompetensi, Peran Aparat Desa, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Mojogedang Karanganyar Jawa Tengah. *Akuntansiku*, 1(4), 299–319. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v1i4.316>
- Laili, N., & Suhaedi, W. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Barat. *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 1(2), 146–154. <https://doi.org/10.57235/mantap.v1i2.1377>
- Marlina, E., Rahmayanti, S., & Futri, A. D. R. A. (2021). Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Kecamatan Rakit Kulim, Riau. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 11(1), 89–100. <https://doi.org/10.37859/jae.v11i1.2517>
- MELASARI, R., SURYANI, S., & INDRIYANI, P. (2024). Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Batang Tuaka Kab. Indragiri Hilir. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 101–110. <https://doi.org/10.32520/jak.v12i2.3052>
- Merawati, L. K., Hariani, N. K., & Yulastuti, I. A. N. (2022). Kompetensi dan Peran Partisipasi

- Masyarakat dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 6(1), 78–99. <https://doi.org/10.35837/subs.v6i1.1765>
- Montero Guche. (2021). *Diduga Bermasalah, Pembangunan di Desa Kobaleba Tak Tersentuh Hukum*. Indonesiasatu.Co. indonesiasatu.co/detail/diduga-bermasalah--pembangunan-di-desa-kobaleba-malah-tak-tersentuh-hukum
- Nurhalimah, Azhar, I., & Agustina Nurul Fajriah. (2023). PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (Studi di Desa pada Kecamatan Langsa Lama). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 5, 1–13.
- Nursin, D., Syamsuddin, S., & Nirwana, N. (2022). Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 7(1), 77–101. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1359>
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Pebriyanto, I. W., & Sumadi, N. K. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(4), 372–381. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i4.2026>
- Polutu, A., Mattoasi, M., & Usman, U. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 89–101. <https://doi.org/10.37905/jar.v3i2.53>
- Ratmono, A. J., Rusmana, O., & Hasanah, U. (2023). Tinjauan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Pengaruh Kompetensi, Kepemimpinan, Partisipasi Masyarakat, dan Pengawasan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 4(4), 273–286. <https://doi.org/10.35912/jakman.v4i4.2315>
- Ratna Laia, V., Simanjuntak, A., & Darma Sipayung, T. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Di Desa Simandraolo Dan Desa Hilinamazihono Kabupaten Nias Selatan). *Jurnal Manajemen*, 8(2), 1–16. <http://ejournal.lmiimedan.net>
- Romadhon, F. A., & Nawawi, Z. M. (2024). Economic Reviews Journal. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 96–108. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i4.536>
- Sarah, S., Taufik, T., & Safitri, D. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen

- Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat Dan Spi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(4), 330–342.
- Setyowati, E. S., Kaukab, M. E., & Romandhon, R. (2020). Antecedent Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 2(1), 55–65. <https://doi.org/10.32500/jebe.v2i1.1464>
- Situngkir, A., & Simarmata, B. I. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Transparansi, dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kabupaten Samosir). *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, 5(2), 96–104. <https://doi.org/10.51510/jakp.v5i2.987>
- Sulaiman Ahmad, S. (2023). Pengaruh Partisipasi Masyarakat , Kompetensi Aparat , Sistem Keuangan Desa dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Luwu Timur Program Studi Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Palopo , Indonesia Judul Bahasa Th. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia (JPTI)*, 3(2), 81–93.
- Ulfi Nella Audia, E. M. (2022). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, peran perangkat desa, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13(3), 833–842.
- Wulandari, M. S., Supartini, & Syahriar. (2022). Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal, Kepemimpinan Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desadi Wilayah Kecamatan Baturetno. *Jurnal Ganeshwara*, 2(2), 1–15.